RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

*LIQUIDITY PROVIDER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** | **Tanggapan/Usulan Perubahan** |
| Menimbang: |  |  |
| 1. bahwa untuk pendalam pasar keuangan dan meningkatkan likuditas Efek yang diperdagangkan melalui Bursa Efek, perlu dilakukan kegiatan *liquidity provider* sehingga memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal; | Likuiditas merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan Efek di pasar modal. Likuiditas secara umum digunakan untuk menggambarkan seberapa likuid suatu transaksi keuangan. Tingginya tingkat likuditas Efek terutama yang diperdagangkan melalui Penyelenggara Pasar, menjadi salah satu variabel penentu yang dapat mendorong peningkatan perdagangan Efek sehingga dapat mendukung pendalaman pasar dan pembentukan harga (*price discovery*).  Dalam konteks perdagangan Efek di pasar modal, terminologi likuiditas secara umum dimaknai sebagai seberapa cepat suatu Efek diperjualbelikan dalam suatu periode waktu tertentu. Suatu Efek dikatakan likuid ketika tingkat permintaan dan penawaran atas Efek dimaksud tinggi sehingga Efek tersebut mudah untuk dijual |  |
| 1. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas kegiatan *liquidity provider*, perlu menetapkan tindakan tertentu mencakup penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek atau pengguna jasa selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek pada penyelenggara pasar; | Pada praktek perdagangan Efek di Indonesia saat ini, terdapat beberapa variabel yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat likuiditas perdagangan Efek di Pasar Modal, dilihat dari masih sedikitnya jumlah saham yang secara konsisten berada dalam daftar indeks pasar saham Indonesia (LQ 45) sebagai saham dengan tingkat likuiditas tinggi, dan masih banyaknya perusahaan tercatat yang sahamnya masuk ke dalam papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia.  Merujuk pada kondisi tersebut dan menimbang pentingnya likuditas Efek, maka salah satu mekanisme yang dapat diterapkan guna meningkatkan likuiditas atas Efek yang kurang likuid adalah dengan skema *Liquidity Provider. Liqudity Provider* merupakan pihak yang melakukan Kuotasi jual dan beli atas suatu Efek guna memastikan terjadinya perdagangan yang terus menerus pada suatu periode tertentu sehingga dapat meningkatkan likuiditas. Dengan adanya aktivitas *Liquidity Provider* ini, maka dapat pula menjaga stabilitas harga Efek di pasar tidak turun secara signifikan akibat ketidakseimbangan penawaran jual dan beli, sehingga proses pembentukan harga dapat lebih optimal |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Liquidity Provider;* | Namun demikian, terdapat potensi ketidaksesuaian kegiatan *Liquidity Provider* dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang mengatur larangan adanya tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar.  Tetapi lebih lanjut dalam Pasal 94 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek dan/atau Pihak lain yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, salah satunya penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek atau Pengguna Jasa selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan Efek pada penyelenggara pasar.  Berdasarkan latar belakang diatas, dalam rangka meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan serta memberikan landasan hukum atas kegiatan *Liquidity Provider*, perlu dibuat pengaturan terkait lingkup dan mekanisme kegiatan *Liquidity Provider* serta menetapkan kegiatan Kuotasi jual-beli Efek secara terus menerus oleh *Liquidty Provider* sebagai kegiatan yang dikecualikan dari Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Liquidity Provider* |  |
| Mengingat: |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |
| Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG *LIQUIDITY PROVIDER*. |  |  |
|  |  |  |
| BAB I |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas. |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |
| 1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. |  |  |
| 1. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. |  |  |
| 1. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada Pasar Modal atau pasar keuangan yang terorganisir. |  |  |
| 1. Bursa Efek adalah Penyelenggara Pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. |  |  |
| 1. Kuotasi adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Efek secara berkelanjutan. |  |  |
| 1. *Liquidity Provider* adalah Pihak yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi Efek tertentu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Efek tersebut. |  |  |
| 1. Afiliasi adalah: |  |  |
| * 1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara hodzontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: |  |  |
| * + - 1. suami atau istri; |  |  |
| * + - 1. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; |  |  |
| * + - 1. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; |  |  |
| * + - 1. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau |  |  |
| * + - 1. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; |  |  |
| * 1. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: |  |  |
| * + - 1. orang tua dan anak; |  |  |
| * + - 1. kakek dan nenek serta cucu; atau |  |  |
| * + - 1. saudara dari orang yang bersangkutan; |  |  |
| * 1. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; |  |  |
| * 1. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; |  |  |
| * 1. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; |  |  |
| * 1. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara pemsahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |  |  |
| 1. Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. |  |  |
| 1. Kontrak Derivatif Efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan waktu tertentu. |  |  |
| 1. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek. |  |  |
|  |  |  |
| BAB II |  |  |
| PERSYARATAN DAN LARANGAN *LIQUIDITY PROVIDER* |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |  |
| 1. Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai *Liquidity Provider* wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan: |  |  |
| 1. bagi Perantara Pedagang Efek: |  |  |
| 1. memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
| 1. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*; dan |  |  |
| 1. memenuhi secara terus menerus persyaratan sebagai *Liquidity Provider* yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar; atau |  |  |
| 1. bagi Pihak lain: |  |  |
| 1. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Liqudity Provider*; |  |  |
| 1. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai *Liquidity Provider*; dan |  |  |
| 1. memenuhi secara terus menerus persyaratan sebagai *Liquidity Provider* yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan Pihak lain yang menjadi *Liquidity Provider* ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |  |
| Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar wajib menyediakan likuiditas dalam perdagangan Efek di Penyelenggara Pasar dengan melakukan Kuotasi Efek tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |  |
| Dalam melakukan kegiatan penyediaan likuiditas atas Efek, *Liquidity Provider* wajib menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 5 | Cukup jelas. |  |
| Kuotasi Efek yang dilakukan oleh *Liquidity Provider* dengan tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |  |
| Kuotasi atas Efek hanya dapat dilaksanakan setelah *Liquidity Provider* memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |  |
| *Liquidity Provider* dilarang untuk melakukan dan/atau memiliki perikatan dalam bentuk apapun dengan Pihak lain untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada Penyelenggara Pasar. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |  |
| Dalam hal *Liquidity Provider* memiliki hubungan Afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pihak yang menerbitkan Efek, yang Efeknya dikuotasikan oleh *Liquidity Provider*, *Liquidity Provider* wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. |  |  |
|  |  |  |
| BAB III |  |  |
| *LIQUIDITY PROVIDER* ATAS TRANSAKSI *SHORT SELLING* ATAU KONTRAK DERIVATIF EFEK |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 9 | Cukup jelas. |  |
| 1. Penyelenggara Pasar menetapkan Efek yang dapat dilakukan Transaksi *Short Selling* oleh *Liquidity Provider.* |  |  |
| 1. Transaksi *Short Selling* oleh *Liquidity Provider* dapat dilakukan terhadap: |  |  |
| 1. saham yang dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*; atau |  |  |
| 1. *Underlying* perdagangan Kontrak Derivatif Efek. |  |  |
| 1. Harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Penyelenggara Pasar dalam melakukan Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan Kuotasi atau *Underlying* perdagangan Kontrak Derivatif Efek, tidak harus di atas harga yang terjadi di Penyelenggara Pasar. |  |  |
| 1. Transaksi *Short Selling* atas saham yang dilakukan oleh *Liquidity Provider* dikecualikan dari kewajiban Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek. |  |  |
| 1. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan persyaratan *Liquidity Provider* untuk melakukan Transaksi *Short Selling* diatur lebih lanjut dalam peraturan Penyelenggara Pasar. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 10 | Cukup jelas. |  |
| Peraturan Penyelenggara Pasar terkait Transaksi *Short Selling* oleh *Liquidity Provider* paling sedikit mengatur hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. *Liquidity Provider* wajib memastikan penyelesaian atas Transaksi *Short Selling*; |  |  |
| 1. penyelesaian atas Transaksi *Short Selling* dapat dilakukan dengan mekanisme antara lain: |  |  |
| 1. memiliki perjanjian pinjam meminjam Efek dengan lembaga kliring dan penjaminan atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan; dan |  |  |
| 1. melakukan *intraday* *short selling*. |  |  |
|  |  |  |
| BAB IV |  |  |
| PENGATURAN *LIQUIDITY PROVIDER* OLEH PENYELENGGARA PASAR |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 11 | Cukup jelas. |  |
| Penyelenggara Pasar wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan *Liquidity Provider*. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 12 | Cukup jelas. |  |
| 1. Penyelenggara Pasar mengatur lebih lanjut terkait persyaratan, hak dan kewajiban, pengenaan sanksi dan pencabutan persetujuan kegiatan *Liquidity Provider* dalam peraturan Penyelenggara Pasar. |  |  |
| 1. Penyelenggara Pasar menyusun peraturan Penyelenggara Pasar terkait *Liquidity Provider*, antara lain memuat substansi terkait: |  |  |
| 1. Efek yang dapat dilakukan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*; |  |  |
| 1. ketentuan Kuotasi oleh *Liquidity Provider*; |  |  |
| 1. persyaratan anggota Bursa Efek atau Pihak lain yang menjadi *Liquidity Provider*; |  |  |
| 1. pemisahan Kuotasi sebagai *Liquidity Provider* dan anggota Bursa Efek; |  |  |
| 1. hak dan kewajiban *Liquidity Provider*; |  |  |
| 1. ketentuan terkait penghentian kegiatan *Liquidity Provider*; |  |  |
| 1. ketentuan minimum yang wajib dipenuhi oleh *Liquidity Provider* dalam melakukan Transaksi *Short Selling*; dan |  |  |
| 1. ketentuan terkait *Liquidity Provider* wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, serta data atas: |  |  |
| 1. catatan transaksi harian Efek; dan |  |  |
| 1. catatan kegiatan pinjam meminjam Efek yang timbul akibat kegiatannya sebagai *Liquidity Provider*. |  |  |
| 1. Ketentuan terkait penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan dan disimpan paling singkat 5 (lima) tahun. |  |  |
| 1. Peraturan Penyelenggara Pasar terkait Liqudity Provider wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| BAB V |  |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |  |
| 1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif. |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |
| 1. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha; |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; dan/atau |  |  |
| 1. pembatalan pendaftaran. |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat. |  |  |
|  |  |  |
| BAB VI |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek; dan |  |  |
| 1. ketentuan yang mengatur mengenai *Liquidity Provider* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 39 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur, |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … 2023  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR  Diundangkan di Jakarta pada tanggal … 2023  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN…NOMOR… |  |  |